



**LAPORAN SINGKAT  
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

---

Tahun Sidang	: 2023– 2024
Masa Sidang	: V
Jenis Rapat	: <b>Rapat Dengar Pendapat</b>
Hari/Tanggal	: Rabu, 10 Juli 2024
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat BAKN RI
Acara	: Dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terkait dengan Pengelolaan PNB
Ketua Rapat	: H. Wahyu Sanjaya, SE
Sekretaris	: Mardi Harjo, S.E., M.Si
Hadir Pimpinan	: 1. H. Wahyu Sanjaya, SE 2. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno 3. Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.
Hadir Anggota	: 1. H. Wahyu Sanjaya, SE 2. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno 3. Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si. 4. Ir. H. Irwan Ardi Hasman 5. Dr. H. M. Amir Uskara, M.KES. 6. Mukhamad Misbakhun S.E.M.H. 7. Ahmad Najib Qodratullah. S.E. M.M
Hadir Tamu	: 1. Fabio Nathan Kacaribu, Ph.D (Kepala BKF). 2. Pande Putu Oka Kusumawardani, SE., M.M., M.P.P., CA (Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara). 3. Wahyu Utomo, S.Sos., M.Si (Kepala Pusat Kebijakan APBN).

**KESIMPULAN / KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat (RDP) BAKN DPR RI dengan Badan Kebijakan Fiskal dibuka pada pukul 13.00 WIB, dipimpin oleh Ketua BAKN H. Wahyu Sanjaya, S.E. dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda RDP hari ini dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terhadap Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak.
3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Kepala BKF untuk memberikan paparan terkait dengan pengelolaan PNB.
4. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pimpinan dan Anggota BAKN DPR RI untuk menyampaikan usulan atau tanggapan terhadap agenda rapat hari ini sebagaimana yang telah disampaikan.

## II. PEMBAHASAN/ KESIMPULAN

Beberapa pembahasan/kesimpulan yang dapat diambil dari RDP BKF terkait pengelolaan PNBP diantaranya:

### 1. Gambaran Umum PNBP

- *Conceptual framework* dalam pengelolaan PNBP yaitu mendorong optimalisasi PNBP dengan tetap menjaga kualitas layanan publik dan kelestarian lingkungan serta menjaga tatakelola yang akuntabel.
- Perkembangan PNBP secara prosentase terhadap PDB relative menurun, sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas, volume produksi, dan kinerja layanan serta sangat dipengaruhi oleh penerimaan berbasis komoditas.
- Faktor-faktor utama yang mempengaruhi PNBP yaitu harga komoditas, dinamika ekonomi, produksi, dan kebijakan.
- Tantangan dan arah kebijakan umum PNBP 2025 berupaya mendorong optimalisasi PNBP dengan tetap menjaga kualitas layanan publik dan kelestarian lingkungan

### 2. Rincian Jenis PNBP

- PNBP SDA Migas, yaitu PNBP yang dihasilkan dari penerimaan bagian negara atas hasil eksploitasi sumber daya alam minyak dan/atau gas bumi setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PNBP SDA Non-Migas yang terdiri atas sektor Minerba, Kelautan dan Perikanan, Kehutan serta Panas Bumi.
- PNBP KND, yaitu kinerja BUMN yang dipengaruhi dinamika perekonomian yang berimplikasi pada setoran dividen. PNBP KND tahun 2018-2023 tumbuh rata-rata 24% PNBP KND terealisasi di atas target yang ditetapkan dalam APBN
- PNBP lainnya dimana PNBP K/L yang merupakan kontributor terbesar PNBP lainnya yang porsinya mencapai 75,9%. PNBP dari 6 K/L pelayanan merupakan kontributor utama dengan porsi rata-rata mencapai 42,8% dari total PNBP 84 K/L. Di tahun 2023, PNBP K/L dari 6 K/L terbesar mencapai Rp55,2 T (41,5%), diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi, Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- PNBP BLU dimana peningkatan Pendapatan Blu, Mengurangi Ketergantungan Pendanaan APBN. Kontribusi pendapatan BLU kesehatan dan Pendidikan cukup signifikan, selain dari BLU pengelola dana yang relatif fluktuatif.

### 3. Rincian PNBP pada 6 K/L Kontributor Utama

- Kinerja PNBP Kemenkominfo periode 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan 5,4%.
- PNBP Polri periode 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan 0,7%, Dimana saat pandemi

tahun 2020 menyebabkan penurunan pendapatan di seluruh layanan terutama Layanan Lalu Lintas (Lantas) yang berkontraksi -18,3%.

- PNBP Kemenhub periode 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan tren pertumbuhan yang relatif meningkat setelah berkontraksi -16,7% pada tahun 2020. Capaian PNBP Kemenhub rata-rata tumbuh 3,8%.
- PNBP Kemenkumham periode 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan tren pertumbuhan yang relatif meningkat setelah berkontraksi -33,5% pada tahun 2020. Capaian PNBP Kemenkumham pada periode tersebut tumbuh rata-rata 30,5%.
- PNBP Kemen ATR/BPN periode 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan tren pertumbuhan yang relatif meningkat setelah berkontraksi -20,6% pada tahun 2020. Capaian PNBP Kementerian ATR/BPN rata-rata tumbuh 7,8%.
- PNBP Kemendikbudristek periode 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 64,6%.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada hari Rabu, 10 Juli 2024 pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 10 Juli 2024

a.n. **PIMPINAN**  
**KABAGSET BAKN,**



**MARDI HARJO, S.E., M.Si**  
**NIP. 19700915 1998 03 1006**